

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asakin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Dadang Juliantara, 2003, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Joko Purnomo, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta.
- R. Bintarto, 1989, *Geografi Desa*, Spring, Yogyakarta.
- Rinto Adi, 2005, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Granti, Jakarta.
- M. Salahudin, 2015, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, Cetakan Pertama, Kemernterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sarman dan Muhammad Taufikmakarao, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Diindonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 1971, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta.
- Widjaya Haw, 2003, *Otonomi Desa*, Raja Garfindo Persada, Edisi Kesatu, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Edisi Keenam, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa.

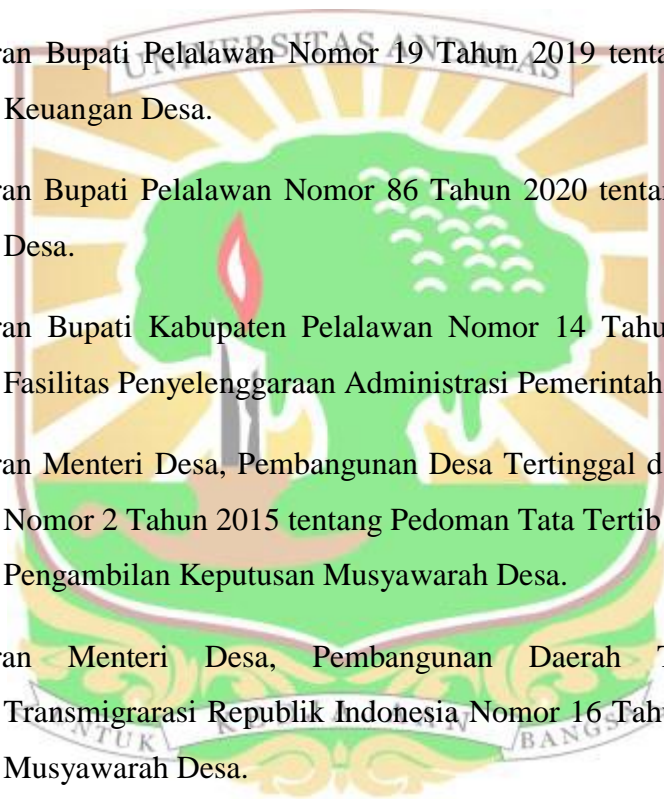
Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.



Peraturan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2023.

**C. Jurnal**

Eka Rini Lestari, 2015, *Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Pилanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau*, E-Jurnal Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Bambang Adhi Pamungkas, 2019, *Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Vol 2 No 2.

Nyimas Latifah Letty Aziz, 2016, *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 13 No. 2, Jakarta.

**D. Website**

<https://jagokata.com/arti-kata/desa.html>

